

**LAPORAN KEUANGAN
KANTOR CAMAT PRINGGARATA**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Cover	I
Daftar Isi	II
Daftar Lampiran.....	III
Pernyataan Tanggung Jawab.....	IV
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	V
Laporan Operasional (LO)	VI
Neraca	VII
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	VIII
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).....	
BAB. I. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD.....	
Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan.....	
1. Pendapatan	
2. Belanja	
BAB. II Pos-Pos Neraca	
1.1. Aset	
1.2. Kewajiban.....	
BAB. III Penutup.....	
Lampiran	
Berita Acara Pemeriksaan Stok Opname per 31 Desember 2023	
Bagian Rekening Air ,Listrikan Internet bulan Desember 2023	
Surat Tanda Setoran (STS)	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Barang Pakai Habis
- Lampiran 2 : Tagihan/Utang Belanja Air
- Lampiran 3 : Surat Tanda Setoran Pengembalian Tunjangan cuti Besar bulan Juli s/d Agustus
An.Lahyati, SH
- Lampiran 5 : Surat Tanda Setoran Sisa Uang Persediaan (UP) Bendahara Pengeluaran 2023

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KANTOR CAMAT PRINGGARATA Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pringgarata, 30 Desember 2022
KANTOR CAMAT PRINGGARATA,
MELALUI
KELOMPOK KERJA
KORPORASI
M. W. S. P. P. P.
DIP. (M. W. S. P. P. P.)





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KECAMATAN PRONGGARATA
TAHUN ANGGARAN 2023
PERIODE PER 31 DESEMBER 2023

HALAMAN 10

URAIAN	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain - lain PAD yang sah				
Jumlah Pendapatan Asli Daerah				
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PEROMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak				
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
Dana Alokasi Umum				
Dana Alokasi Khusus				
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			0,00	
Dana Otonomi Khusus				
Dana Penyesuaian				
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya				
TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
Jumlah Pendapatan Antar Daerah				
Total Pendapatan Transfer				
LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Donasi			0,00	
Pendapatan Lainnya				
Jumlah Pendapatan Lain - lain yang sah				
JUMLAH PENDAPATAN				
BIAYA				
BIAYA OPERASI				
Belanja Pegawai	1.556.300.433	1.561.745.059	100,46	1.545.904.857
Belanja Barang	949.142.544	894.588.207	94,25	703.781.839
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi	2.505.442.977,00	2.456.333.266,00	98,02	2.249.686.696,00
BIAYA MODAL				
Belanja Tanah			0,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	282.812.080	249.070.000	88,07	
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
Belanja Aset Tetap Lainnya				
Belanja Aset Lainnya			0,00	
Jumlah Belanja Modal	282.812.080,00	249.070.000,00	88,07	

URAIAN	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga				
Jumlah Belanja Tak Terduga	-	-		-
Jumlah Belanja	2.788.262.157,00	2.707.403.266,00	97,10	2.249.666.596,00
TRANSFER				
TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA				
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota				
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota				
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota				
Jumlah Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota	-	-	#DIV/0!	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.788.262.157,00	2.707.403.266,00	97,10	2.249.666.596,00
SURPLUS/DEFISIT	(2.788.262.157,00)	(2.707.403.266,00)	97,10	(2.249.666.596,00)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA				
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
Pinjaman Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
Jumlah Penerimaan	-	-	#DIV/0!	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan				
Jumlah Pengeluaran	-	-	#DIV/0!	-
PEMBIAYAAN NETTO	-	-	#DIV/0!	-
Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran	(2.788.262.157,00)	(2.707.403.266,00)		(2.249.666.596,00)


CAMAT PRINGGARATA
 H.MASMUN, S.Pd, M.Pd
 NIP.196812311993021013



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NERACA
KECAMTAN PRINGGARATA
PER 31 Desember 2024 DAN 31 Desember 2023

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di BLUD	-	-
Setara Kas	-	-
Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)	-	-
Kas di Bendahara BOS	-	-
Kas lainnya	-	-
Piutang Pendapatan		
Piutang Pajak Daerah	-	-
Piutang Retribusi Daerah	-	-
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di pisahkan	-	-
Piutang Lain-lain PAD	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
Penyisihan Piutang Pendapatan	-	-
Piutang Lainnya		
Uang Muka Pekerjaan	-	-
Piutang Lain-lain Lainnya	-	-
Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
Beban Dibayar Dimuka		
Persediaan	135.000,00	237.532
JUMLAH ASET LANCAR	135.000,00	237.532,00
ASET TETAP		
Tanah	199.100.000,00	199.100.000
Peralatan dan Mesin	896.111.615,00	648.561.615
Gedung dan Bangunan	1.696.318.500,00	1.696.318.500
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	17.581.550,00	17.581.550
Aset Tetap Lainnya	1.875.000,00	1.875.000
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(1.235.852.763,00)	(1.133.134.971,00)
JUMLAH ASET TETAP	1.575.133.902,00	1.430.301.694
PROPERTI INVESTASI		
Properti Investasi Tanah	-	-
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	-	-
Akum Penyusutan Kemitraan dg Pihak III	-	-
ASET LAINNYA		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Akum Penyusutan Kemitraan dg Pihak III	-	-
Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Aset Lain-lain		
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	-

URAIAN	2023	2022
JUMLAH ASET LAINNYA	-	-
JUMLAH ASET	1.575.268.902,00	1.430.539.226,00
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Utang Belanja	-	-
Utang Transfer	38.558.985,00	44.101.300
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	38.558.985,00	44.101.300
JUMLAH KEWAJIBAN	38.558.985,00	44.101.300
EKUITAS		
EKUITAS	1.536.709.917,00	1.386.437.926
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.575.268.902,00	1.430.539.226,00





**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRINGGARATA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023**

URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN /(PENURUNAN)	(%)
LAPORAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN DAERAH-LO				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
Retribusi Daerah	-	-	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-
PENDAPATAN TRANSFER-LO				
Transfer Pemerintah Pusat - LO				
Dana Perimbangan - LO	-	-	-	-
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-
Transfer Antar Daerah - LO				
Pendapatan Bagi Hasil - LO	-	-	-	-
Bantuan Keuangan - LO	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO				
Pendapatan Hibah - LO	-	-	-	-
Dana Darurat-LO	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
BIAYA OPERASIONAL				
Biaya Pegawai	2.557.131.275,00	2.370.741.835,00	186.389.440,00	7,29
Biaya Barang dan Jasa	1.558.326.750,00	1.588.668.691,00	(30.341.941,00)	-1,95
Biaya Bunga	896.086.733,00	703.855.800,00	192.230.933,00	21,45
Biaya Hibah	-	-	-	-
Biaya Bantuan Sosial	-	-	-	-
Biaya Penyusutan dan Amortisasi	-	-	-	-
Biaya Penyisihan Piutang	102.717.792,00	78.217.344,00	24.500.448,00	23,85
Biaya Transfer	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2.557.131.275,00)	(2.370.741.835,00)	(186.389.440,00)	7,29
KEGIATAN NON - OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Janjka Panjang - LO	-	-	-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Janjka Pendek - LO	-	-	-	-
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	-
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	-	-	-	-
Defisit Penyelesaian Kewajiban Janjka Panjang - LO	-	-	-	-
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2.557.131.275,00)	(2.370.741.835,00)	(186.389.440,00)	7,29
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
Biaya Luar Biasa	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2.557.131.275,00)	(2.370.741.835,00)	(186.389.440,00)	7,29


 PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 KECAMATAN PRINGGARATA
 H. MASNUN S.Pd, MPd
 NIP. 196812311993021013



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRINGGARATA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	1.386.437.926	1.507.513.165,00
SURPLUS/(DEFISIT)-LC	(2.518.707.290)	(2.370.741.835,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-	-
Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	-	-
Koreksi Ekuitas - Investasi	-	-
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	-	-
Koreksi Ekuitas - Kewajiban	-	-
R/K PPKD	2.707.403.266,00	2.249.666.596,00
EKUITAS AKHIR	1.575.133.902,00	1.386.437.926,00

CAMAT PRINGGARATA



H. MASNIW, S.Pd, M.Pd
NIP. 196812311993021013



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH KECAMATAN PRINGGARATA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a) Asumsi Kemandirian entitas, berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan.
- b) Asumsi kesinambungan entitas, berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksud untuk melakukan likuidasi.
- c) Asumsi keterukuran, berarti bahwa laporan keuangan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan uang.

2. Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah adalah basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*), dimana basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca.

- a) Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa :
 - 1) Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Aset, kewajiban dan ekuitas dana yang disajikan dalam Neraca diakui diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

3. Basis Pengukuran

Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan SKPD ini menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas

yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan SKPD ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPD ini telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

1) Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenisnya. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan dilakukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto bukan jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode berjalan maupun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama dan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat pendapatan adalah Surat Tanda Setoran (STS), Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dokumen lain yang terkait.

2) Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perendahaan (Bendahara Umum Daerah). Belanja diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meliputi

belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

c) Belanja Lain-lain/Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

b. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana (net aset).

1) Aset

Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a) Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar ini terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Persediaan.

(1) Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) merupakan kas yang menjadi tanggungjawab atau yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara

Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas, termasuk pajak-pajak yang telah dipungut yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca.

- (2) **Kas di Bendahara Penerimaan** adalah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah.
- (3) **Piutang Pajak**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan pajak (SKP-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal pajak yang belum dilunasi.
- (4) **Piutang Retribusi**, yakni piutang yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya/ketetapan retribusi (SKR-D) atau surat lain yang dipersamakan. Piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal retribusi yang belum dilunasi.
- (5) **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran** merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (6) **Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)** merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (7) **Persediaan** adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga perolehan untuk persediaan yang diperoleh dengan cara membeli, harga standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri, dan berdasarkan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan. Persediaan tersebut dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Dokumen sumber untuk mencatat persediaan adalah laporan stock opname yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan yang tersisa pada akhir tahun anggaran.

b) Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen

(1) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen Pemerintah Daerah dapat berupa Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan/atau investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dan dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Penilaian investasi dilakukan dengan metode biaya apabila kepemilikan Pemerintah Daerah kurang dari 20%, antara 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi mempunyai pengaruh yang signifikan menggunakan dan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

(2) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkeanjutan. Investasi Non Permanen yang dilakukan pemerintah dapat berupa dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan investasi permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi Non permanen meliputi seluruh dana pemerintah daerah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota Koperasi, Kelompok Swadaya Masyarakat, Badan Perkreditan Rakyat.

Penilaian investasi non permanen ini menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

c) Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap diakui pada saat aset tetap tersebut telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap terdiri dari: Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan dan Instalasi, Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan masing-masing aset tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

(2) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.

(3) Jalan, Jaringan dan instalasi

Jalan, jaringan dan instalasi, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.

(4) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

(5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasi sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Nilai konstruksi yang dikerjakan kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus diayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan dan pembayaran kalim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan dan bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Termasuk Aset Lainnya adalah antara lain Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

(1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari berita acara penjualan aset yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh Bagian Aset.

(2) **Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi menggambarkan tagihan kepada bendahara/pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terbukti menyalahgunakan uang negara/daerah atau menghilangkan aset pemerintah/pemerintah daerah. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

(3) **Aset Tak Berwujud**

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya serta hasil kajian/penelitian.

(4) **Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap pemerintah daerah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah (aset tetap yang kondisinya rusak berat) dan aset-aset yang diserahkan kepada pihak ketiga, namun belum ada naskah hibahnya.

3) **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar kembalidalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban muncul antara lain karena sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(1) **Utang Perhitungan Pihak Ketiga**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

(2) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi kewajiban jangka panjang ke dalam bagian lancar utang jangka pendek yang disebabkan adanya kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.

(3) **Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPH)**

Utang Pemotongan Pajak Pusat merupakan kewajiban yang timbul akibat Bendahara Pengeluaran belum menyetorkan PPN/PPH yang dipungut dari transaksi belanja barang dan jasa.

(4) **Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang kepada Pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul karena pemerintah telah menerima barang atau jasa yang ada pada kontrak perjanjian namun belum dilakukan pembayaran atas barang atau jasa tersebut.

b) **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4) **Ekuitas Dana**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah.

5) **Akuntansi Surplus/Defisit**

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

6) **Transaksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Berbentuk Barang dan Jasa**

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diterima/dikeluarkan. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah secara garis besar telah mengacu kepada

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun demikian masih terdapat hal yang masih belum sesuai dengan ketentuan dalam SAP yakni seluruh aset tetap yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Daerah selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 53, dimana *Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi).*

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
I. POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan

Dari target pendapatan asli daerah tahun 2023 sebesar Rp.0,- Dapat direalisasikan sebesar Rp.0 atau 0% , dengan kekurangan* dari target sebesar Rp. 0,- .Pendapatan tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Retribusi			
Jumlah				

Perincian Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Retribusi Daerah

Pendapatan dari Retribusi Daerah tidak dapat mencapai/melampaui* target yang telah ditetapkan. Dari target pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp. 0 dapat direalisasikan sebesar Rp.0 atau 0%. Realisasi Retribusi Daerah pada Kecamatan Pringgarata selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan		0	0
TOTAL			0	0

Terlampainya target yang telah ditetapkan disebabkan karena Pengelola Pasar diambil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah

b) Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan ini diperoleh dari pengembalian kelebihan pembayaran Tunjangan Jabatan Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan dari pengembalian		980.000	0
2.	Pendapatan dari Pengembalian	0	5.412.485	
TOTAL		0	6.392.485	0

2. Belanja

Dari Anggaran Belanja Kecamatan Pringgarata yang tertuang dalam APBD 2023 sebesar Rp.2.800.262.157 realisasinya mencapai Rp 2.707.403.266,-atau 96,68% dengan sisa anggaran sebesar Rp.108.563.042,-.

Adapun perincian dari realisasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	2.517.450.077	2.458.333.266	97,65
2.	Belanja Modal	282.812.080	249.070.000	88,06
Jumlah		2.800.262.157	2.707.403.266	

Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2023 sampai dengan semester II sebesar Rp. 2.458.333.266, atau 97,65 % dari anggaran sebesar Rp. 2.800.262.157

.Realisasi belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	1.569.500.433	1.564.945.059	99,71
2.	1)Belanja Barang dan Jasa :			
	1) Belanjabarang	716.153.416	688.002.849	95,21
	2) Belanja Jasa	16.569.032	13.062.133	92,60
	3) Belanja Pemeliharaan	142.079.196	133.730.600	94,12
	4) Belanja Perjalanan Dinas	21.948.000	12.543.696	57,17
	5) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/Pihak lainnya Masyarakat	51.200.000	51.200.000	100%
	2) Barang dan Jasa selain Hibah			
Jumlah		2.517.450.077	2.458.333.266	97,65

Realisasi belanja operasi diatas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp.1.564.945.059

dari target anggaran sebesar Rp. 1.569.500.433

atau 99,71% dari target belanja operasi secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Gaji dan Tunjangan PNS	1.056.348.351	1.054.779.778	99,85%
2	Tambahan Penghasilan PNS	509.558.082	506.571.281	99,41 %
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan			

	Objektif Lainnya ASN	3.594.000,00	3.594.000	100 %
4	Insentif atas Pemungutan Retribusi daerah			
	Jumlah	1.569.500.433	1.564.945.059	99,71%

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.949.149.643 dan realisasise besar Rp.894.588.207 atau 88,06 %yang terdiri dari:

a) Belanja barang/jasa dapat dirinci sebagai berikut:

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
	1)Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sbb :	947.949.644	894.388.207	94,24 %
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		2.640.000	
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas		432.000	
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya		66.015.100	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		86.285.143	
	Belunia Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak		2.396.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		1.000.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		9.079.505	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik		4.752.219	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas		1.933.000	
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	40.317.332	38.160.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		278.615.000	
	Belanja Barang Tak Habis Pakai	12.234.828	12.157.600	
2	Belanja Jasa Kantor	248.032.682	62.859.144	
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	576.000	576.000	

4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	143.920.000	91.927.800	
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi		8.778.000	
	Belanja Sosialisasi		70.600.000	
	Belanja Pemeliharaan		92.638.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		12.543.696	
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		51.200.000	
	Jumlah	947.949.644	893.388.207	94,24 %

b) Belanja Modal

Realisasi belanja modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 249.070.000 atau 88,06% dari anggaran sebesar Rp. 282.812.080,-.

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Modal Kendaraan berpenumpang Kendaraan Dinas Roda 4	251.433.180	245.000.000	97,44 %
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya	1.585.600	1.520.000	95,86
3	Belanja Modal pengadaan Komputer Belanja Modal Alat Pendingin	2.550.000 27.243.300	2.550.000 0	100%
Jumlah		282.812.080	249.070.000	88,06 %

Realisasi belanja modal tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Peralatan dan Mesin

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga			
2	Belanja Modal Pengadaan alat rumah tangga	1.585.600	1.520.000	95,86

2. Cedung dan Bangunan

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1.	Gedung dan Bangunan	0	0	-
	Jumlah	0	0	-

* Disesuaikan dengan keadaan senyatanya di masing-masing SKPD.

3. Surplus/Defisit

Dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, maka terjadi defisit realisasi anggaran adalah sebesar Rp2.518.707.290- atau sekitar 100%.

II. POS-POS NERACA

1. ASET

a. Aset Tetap

Saldo Aset tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 1.575.133.902,- dan Rp.1.430.301.694,-Nilai Aset Tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo per 30-06- 2023(Rp)	Saldo per 31-12- 2022(Rp)
1.	Tanah	199.100.000	199.100.000
2.	Peralatan dan Mesin	896.111.615	648.561.615
3.	Gedung dan Bangunan	1.696.318.500	1.696.318.500
4.	Jalan, irigasi dan Jaringan	17.581.550	17.581.550
5.	Aset Tetap Lainnya	1.875.000	1.875.000
6.	Akumulasi Penyusutan	(1.1235.852.763)	(1.133.134.971)
	Jumlah	1.575.133.902	1.430.301.694

Jumlah aset tetap pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.575.133.902 dari keadaan tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.430.301.694 karena terdapat mutasi penambahan aset tetap pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 249.070.000, akumulasi penyusutan sebesar Rp. (1.133.134.971) mutasi kurang aset tetap sebesar Rp. 0

Mutasi Aset Tetap pada Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Aset	Saldo tahun 2023	Mutasi		Saldo tahun 2022
		Tambah	Kurang	
Tanah	199.100.000	-	-	199.100.000
Peralatan dan Mesin	896.111.615	249.070.000	-	648.561.615
Gedung & Bangunan	1.696.318.500	-	-	1.696.318.500
Jalan, irigasi dan Jaringan	17.581.550	-	-	17.581.550
Aset Tetap Lainnya	1.875.000	-	-	1.875.000

2. Gedung dan Bangunan

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1.	Gedung dan Bangunan	0	0	-
	Jumlah	0	0	-

* Disesuaikan dengan keadaan senyatanya di masing-masing SKPD.

3. Surplus/Defisit

Dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, maka terjadi defisit realisasi anggaran adalah sebesar Rp2.518.707.290- atau sekitar 100%.

II. POS-POS NERACA

1. ASET

a. Aset Tetap

Saldo Aset tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 1.575.133.902,- dan Rp.1.430.301.694,-Nilai Aset Tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari:

No	Uraian	Saldo per 30-06- 2023(Rp)	Saldo per 31-12- 2022(Rp)
1.	Tanah	199.100.000	199.100.000
2.	Peralatan dan Mesin	896.111.615	648.561.615
3.	Gedung dan Bangunan	1.696.318.500	1.696.318.500
4.	Jalan, irigasi dan Jaringan	17.581.550	17.581.550
5.	Aset Tetap Lainnya	1.875.000	1.875.000
6.	Akumulasi Penyusutan	(1.1235.852.763)	(1.133.134.971)
	Jumlah	1.575.133.902	1.430.301.694

Jumlah aset tetap pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.575.133.902 dari keadaan tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.430.301.694 karena terdapat mutasi penambahan aset tetap pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 249.070.000, akumulasi penyusutan sebesar Rp. (1.133.134.971) mutasi kurang aset tetap sebesar Rp. 0 Mutasi Aset Tetap pada Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis Aset	Saldo tahun 2023	Mutasi		Saldo tahun 2022
		Tambah	Kurang	
Tanah	199.100.000	-	-	199.100.000
Peralatan dan Mesin	896.111.615	249.070.000	-	648.561.615
Gedung & Bangunan	1.696.318.500	-	-	1.696.318.500
Jalan, irigasi dan jaringan	17.581.550	-	-	17.581.550
Aset Tetap Lainnya	1.875.000	-	-	1.875.000

Akumulasi Penyusutan	(1.235.852.763)			
Jumlah ASET	1.575.133.902	-	-	(1.133.134.971)
Mutasi aset tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:		-	-	1.430.301.694

1) Tanah

Nilai tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 199.100.000 dan 199.100.000, yang menunjukkan tidak adanya mutasi baik mutasi tambah maupun kurang.

1) Peralatan dan Mesin

Jenis Aset	Saldo tahun 2023	Mutasi		Saldo tahun 2022
		Tambah	kurang	
Alat-alat Kantor Dan Rumah Tangga	897.631.615	249.070.000		648.561.615
Jumlah	897.631.615			648.561.615

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 897.631.615 dan Rp. 648.561.615 yang menunjukkan terdapat penambahan, Perubahan nilai Peralatan dan Mesin pada tahun anggaran 2023.

2) Gedung dan Bangunan

Jenis Aset	Saldo tahun 2023	Mutasi		Saldo tahun 2022
		Tambah	Kurang	
Gedung	1.696.318.500	0	-	1.696.318.500
Jumlah	1.696.318.500	0	-	1.696.318.500

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 1.696.318.500 dan Rp. 1.696.318.500 yang menunjukkan tidak terdapat penambahan Perubahan nilai Gedung dan Bangunan karena pada tahun anggaran 2022 tidak terjadi mutasi tambahan dan mutasi Pengurangan.

3) Jalan, irigasi dan Jaringan

Jenis Aset	Saldo tahun 2023	Mutasi		Saldo Tahun 2022
		Tambah	Kurang	
Jaringan Instalasi	17.581.550	-	-	17.581.550
Jumlah	17.581.550	-	-	17.581.550

Nilai Jalan, Jaringan dan instalasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 17.581.550 dan Rp. 17.581.550 yang menunjukkan tidak terdapat penambahan maupun pengurangan.

4) Aset Tetap Lainnya.

Jenis Aset	Saldo tahun 2023	Mutasi		Saldo Tahun 2022
		Tambah	Kurang	
Pengadaan penghias ruangan rumah tangga	1.875.000			
Jumlah	1.875.000	-	-	1.875.000
		-	-	1.875.000

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 1.875.000 dan Rp. 1.875.000 yang menunjukkan tidak adanya mutasi tambah maupun kurang

b. aset Lainnya

1. Aset Lain-lain

Jenis Aset	Saldo tahun 2023	Mutasi		Saldo Tahun 2022
		Tambah	Kurang	
Akumulasi penyusutan aset lain-lain	1.133.134.971			
Jumlah	1.133.134.971	-	-	1.133.134.971

2. KEWAJIBAN

1) Kewajiban Jangka Pendek

Saldo kewajiban jangka pendek merupakan utang belanja yang belum dibayar sampai dengan berakhirnya tahun anggaran. kewajiban jangka pendek terdiri dari:

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)
1.	Utang belanja	0	
	TOTAL	0	

3. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp. 1.575.133.902,- dan Rp. 1.430.539.226,-

Pringgarata, Desember 2023



PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Camat Pringgarata Kabupaten lombok Tengah disusun untuk menjelaskan Laporan Keuangan secara lebih terinci. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Keuangan. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahpahaman dan untuk menyamakan persepsi bagi para pengguna laporan sehingga pada gilirannya akan memudahkan pengguna laporan dalam memahami dan menggunakan laporan keuangan guna pengambilan keputusan.

Penyajian Laporan Keuangan Camat Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah ini masih kurang sempurna, namun yang terpenting ada semangat belajar sambil bekerja (*learning by doing*) dari seluruh jajaran Camat Pringgarata Kabupaten lombok Tengah dalam upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi yang terkendali. Besar rasa terimakasih, kami sampaikan kepada segenap jajaran dilingkungan Camat Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang telah mendukung tersusunnya Laporan Keuangan ini.

Pringgarata, 2023
Camat Pringgarata
Kabupaten Lombok Tengah,





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRINGGARATA

Jl. Raya Pringgarata

Kode Pos 83562

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOK OPNAME

Pada hari ini Rabu tanggal 27 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : H. Masnun, S.Pd., M.Pd

Jabatan : Camat Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 17 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang habis pakai kepada :

Nama : ERNAWATI

Jabatan : Pengurus barang pada kantor camat pringgarata Kab. Lombok Tengah

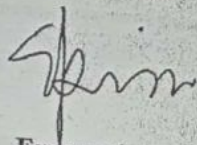
Berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang ada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah barang yang kami hitung dihadapan pejabat itu adalah :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.	Catridge, Epson L120			
2.	Catridge, Epson L31130			
3.	Tinta Warna Printer Canon			
4.	Ballpoint			
5.	Cetak Buku Kertas HVS			
6.	Kertas HVS A4 Putih 70 gram			
7.	Kertas HVS F4 Putih 70 gram			
8.	Ballpoint, 6 Kotak x 45.000			
9.	Kertas Karton Folio Merk Buffalo Warna-warni, 125 Lembar x 6.000			
10.	Kertas HVS A4 Putih 70 gram x 75.000	1 rim	70,000	70,000
11.	Kertas HVS F4 Putih 70 gram x 65.000	1 rim	65,000	65,000
12.	Tinta Printer Epson, 70 ml (set 4			
13.	Cartidge Epson L3110 Hitam			
14.	Cetak Buku Kertas HVS			
15.	Fotocopy			
16.	Kertas HVS, 4a Putih 70 gram			
17.	Fotocopy Bahan HVS 1 Muka			
18.	Cetak Buku Kertas HVS			
19.	Foto Copy			
20.	Isi Tabung Gas Elpiji 3 kg x 2 kali x 12 bulan			
21.	Tinta printer Epson L360 Original, 70 ml (set 4warna).			
22.	Kertas HVS 70 gram A4			
23.	Kertas HVS 70 gram F4			
24.	Kertas HVS 70 gram A4			

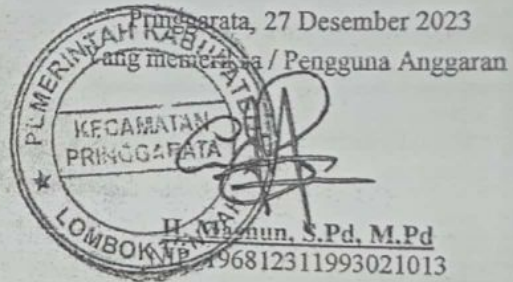
25.	Kertas HVS 70 gram F4			
26.	Fotocopy			
27.	Buku kertas HVS A4 putih			
28.	Buku Kertas HVS F4 putih			
29.	Cetak Buku Kertas HVS Utk .Folio /kwarto 2muka Hitam putih			
30.	Foto copy Bahan HVS 1 muka			
	Jumlah			135,000

Pengurus Barang,



Ernawati

NIP : 1978072007012015





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

INSPEKTORAT

Jl. Raden Pugu-Praya Kompleks Kantor Bupati Gedung C Lantai 4

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOCK OPNAME BARANG HABIS PAKAI

Pada hari ini Minggu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan dibawah ini :

No	Nama	Jabatan
1	H. Lalu Aknal Afandi	Penanggung Jawab
2	H. Abdi Manap	Wk. Penanggung Jawab
3	Naily Indriaty	Pengendali Teknis
4	I Ktut Budiarta	Ketua Tim
5	Lalu Bintang Turunan	Anggota

Sesuai dengan surat perintah tugas nomor : 700/41/2023/INS/TT Tanggal Desember 2023, kami melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang habis pakai per tanggal 30 Desember 2023 kepada :

Nama Lengkap : ERNAWATI

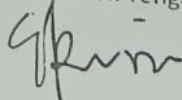
Jabatan : Bendahara Barang pada Kantor Camat Pringgarata

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemukan kenyataan sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan
1.	Catridge, Epson L120	0	Buah
2.	Catridge, Epson L31130	0	Buah
3.	Tinta Warna Printer Canon	0	Buah
4.	Ballpoint	0	Kotak
5.	Cetak Buku Kertas HVS	0	Lembar
6.	Kertas HVS A4 Putih 70 gram	1	Rim
7.	Kertas HVS F4 Putih 70 gram	1	Rim
8.	Ballpoint, 6 Kotak x 45.000	0	Kotak
9.	Kertas Karton Folio Merk Buffalo Warna-warni,125 Lembar x 6.000	0	Lembar
10.	Kertas HVS A4 Putih 70 gram x 75.000	0	Rim
11.	Kertas HVS F4 Putih 70 gram x 65.000	0	Rim
12.	Tinta Printer Epson, 70 ml (set 4	0	Buah
13.	Cartidge Epson L3110 Hitam	0	Buah
14.	Cetak Buku Kertas HVS	0	Lembar
15.	Fotocopy	0	Lembar
16.	Fotocopy	0	Rim
17.	Kertas HVS, 4a Putih 70 gram	0	Lembar
18.	Fotocopy Bahan HVS 1 Muka	0	Lembar
19.	Cetak Buku Kertas HVS	0	Lembar
20.	Foto Copy	0	Buah
21.	Isi Tabung Gas Elpiji 3 l: g x	0	Paket
22.	Tinta printer Epson L360	0	Rim
23.	Kertas HVS 70 gram A4	0	Rim
23.	Kertas HVS 70 gram F4	0	Rim

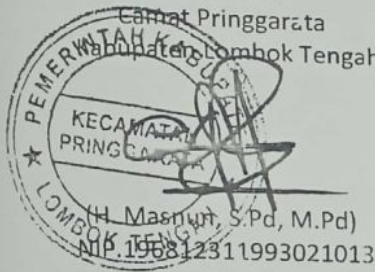
24.	Kertas HVS 70 gram A4		
25.	Kertas HVS 70 gram F4	0	Rim
26.	Fotocopy	0	Rim
27.	Buku kertas HVS A4 putih	0	Lembar
28.	Buku Kertas HVS F4 putih	0	Rim
29.	Cetak Buku Kertas HVS Utk .Folio /kwarto 2muka Hitam putih	0	Rim
30.	Foto copy Bahan HVS 1 muka	0	Lembar

Menyetujui
 Pengurus Barang
 Kantor Camat Pringgarata
 Kabupaten Lombok Tengah



(ERNAWATI)
 NIP.1978072007012015

Mengetahui
 Camat Pringgarata
 Kabupaten Lombok Tengah



Tim Pemeriksa :

1. _____ (H. Lalu Aknal Afandi)
2. _____ (H. Abdi Manap)
3. _____ (Naily Indriaty)
4. _____ (I Ktut Budiarta)
5. _____ (Lalu Bintang Turunan)

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

0004/STS/PRT/2023

Bank : BANK NTB Cab. Praya
No. Rekening : 003.21.00706.00-0

diterima uang sebesar : 5.412.485,00
an huruf) : Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah

an rincian penerimaan sebagai berikut :

KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp.)
4 1 4 .1G.10	Setoran Saldo UP Bulan Nopember Tahun 2025	5.412.485,00
Jumlah		5.412.485,00

Uang tersebut diterima pada tanggal 2023

Mengetahui :
Camat Pringgarata,

MASNUH, S.Pd, M.Pd
196812311993021013

Bendahara Pengeluaran,

BAIQ SRI HAERONI
NIP. 197812312009012006

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kec. Kemuningtata 83042

563438258

TELEPON TERBUKA
TELEFON

tanggal : 19-01-2021 10:33:20
No. Regi : 90152-01.1020/18001/10 Refusad : 991176096

nomor telepon :	40570-6012 9348		
klas pelayanan :	1044031		
jenis :	03 (Jarak) : 0000		
PLN/AMBI :	0000	tarif kan Rp. :	477.800
		aduan Rp. :	2.500
		switch lokal Rp. :	477.800

PMV 2021

Bukti pembayaran ini adalah sah jika sudah ditempel cap tanggal PSE

PA : 01.001.620.2-375.000 dan PA PSE



KANTOR POS



Lacak status : <http://info/www.posindonesia.co.id>

PT. PAM
 LOMBOK TENGAH
 Jl. P. Wani No 11 FRANG
LUNAS

BUKTI PEMBAYARAN REKENING AIR

Bulan : Des. 2023 Norek : 0.1
 No. Sako : 030107709 JUMLAH TAGIHAN
 Name : R. D. CAPAT
 Alamat : PRINGGARATA

STAND PETER (PS) DAN TARIF AIR Rp/PS

Bun. Psi	Volume	Tarif	Harga Air
Bin. Psi : 4337	10	2946	29.460
Bin. Laku : 4316	10	3330	33.300
Pakai PS : 21	1	4419	4.419

JUMLAH TAGIHAN

> Harga Air	Rp	72.179
> Beban Tetap :		
Administrasi	Rp	0
Penel. Pieter	Rp	0
> Asuransi	Rp	0
> Denda	Rp	0
> Ruka Kembali	Rp	0
JUMLAH TAGIHAN	Rp	72.179

Level : 08/ Pringgarata
 17-01-2024 01:39:53 PM Kasir : pringgarata

Gibn ini merupakan bukti yang sah atas transaksi anda.
 Terima kasih